



**BADAN KEUANGAN
KABUPATEN NGAWI**

**RISK REGISTER
DAN
RENCANA TINDAK PENGENDALIAN
TAHUN 2022**

Form 7

Formulir Kertas Kerja Identifikasi Risiko Strategis Perangkat Daerah

Nama Pemerintah Daerah : Pemerintah Kabupaten Ngawi

Nama Perangkat Daerah : Badan Keuangan

Tahun Penilaian : 2022

Periode yang dinilai : Periode Renstra (Tahun 2021-2026) Perangkat Daerah

Tujuan Strategis : Meningkatnya kapasitas tata kelola pemerintahan

Urusan Pemerintahan : Unsur Penunjang

Perangkat Daerah yang : Badan Keuangan

Dinilai

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Resiko			Sebab			Dampak	
			Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber	C/UC	Uraian	Pihak yang Terkena
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
A	Tujuan: Meningkatnya kapasitas tata kelola pemerintahan	Indek Pengelolaam Keuangan Daerah								
1	Sasaran Strategis Perangkat Daerah: Meningkatnya kualitas implementasi SAKIP Perangkat Daerah	Nilai LHE AKIP Perangkat Daerah	Nilai LHE AKIP tidak tercapai sesuai target	RSO.22.37.25.01	Kepala Badan Keuangan	Data dukung untuk pemenuhan LKE tidak lengkap	Internal	C	Nilai LHE AKIP tidak sesuai target	Kepala Badan Keuangan
2	Sasaran Strategis Perangkat Daerah: Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	Persentase PAD terhadap APBD	Persentase PAD kecil	RSO.22.37.25.02	Kepala Badan Keuangan	Kurang nya upaya optimalisasi Pajak dan Retribusi sebagai sektor yang paling besar, memberikan kontribusi terhadap PAD	Internal	C	Sumber Pendanaan APBD kurang Maksimal	Kepala Badan Keuangan
3	Sasaran Strategis Perangkat Daerah: Meningkatnya kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Pengelolaan Keuangan Kategori Tertib	Penetapan APBD tidak tepat waktu	RSO.22.37.25.03	Kepala Badan Keuangan	Dinamika Regulasi	Internal	C	Penundaan penyaluran DAU	Kepala Badan Keuangan
			Pelaksanaan APBD tidak tepat waktu	RSO.22.37.25.04	Kepala Badan Keuangan	Penyerapan anggaran tidak sesuai dengan anggaran kas yang ditetapkan	Internal	C	Penyerapan APBD rendah	Kepala Badan Keuangan

Form 7
Formulir Kertas Kerja Identifikasi Risiko Strategis Perangkat Daerah

Nama Pemerintah Daerah : Pemerintah Kabupaten Ngawi

Nama Perangkat Daerah : Badan Keuangan

Tahun Penilaian : 2022

Periode yang dinilai : Periode Renstra (Tahun 2021-2026) Perangkat Daerah

Tujuan Strategis : Meningkatnya kapasitas tata kelola pemerintahan

Urusan Pemerintahan : Unsur Penunjang

Perangkat Daerah yang : Badan Keuangan

Dinilai

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Resiko			Sebab			Dampak	
			Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber	C/UC	Uraian	Pihak yang Terkena
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
A	Tujuan: Meningkatnya kapasitas tata kelola pemerintahan	Indek Pengelolaam Keuangan Daerah								
1	Sasaran Strategis Perangkat Daerah: Meningkatnya kualitas implementasi SAKIP Perangkat Daerah	Nilai LHE AKIP Perangkat Daerah	Nilai LHE AKIP tidak tercapai sesuai target	RSO.22.37.25.01	Kepala Badan Keuangan	Data dukung untuk pemenuhan LKE tidak lengkap	Internal	C	Nilai LHE AKIP tidak sesuai target	Kepala Badan Keuangan
2	Sasaran Strategis Perangkat Daerah: Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	Persentase PAD terhadap APBD	Persentase PAD kecil	RSO.22.37.25.02	Kepala Badan Keuangan	Kurangnya upaya optimalisasi Pajak dan Retribusi sebagai sektor yang paling besar memberikan kontribusi terhadap PAD	Internal	C	Sumber Pendanaan APBD kurang Maksimal	Kepala Badan Keuangan
3	Sasaran Strategis Perangkat Daerah: Meningkatnya kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Pengelolaan Keuangan Kategori Tertib	Penetapan APBD tidak tepat waktu	RSO.22.37.25.03	Kepala Badan Keuangan	Dinamika Regulasi	Internal	C	Penundaan penyaluran DAU	Kepala Badan Keuangan
			Pelaksanaan APBD tidak tepat waktu	RSO.22.37.25.04	Kepala Badan Keuangan	Penyerapan anggaran tidak sesuai dengan anggaran kas yang ditetapkan	Internal	C	Penyerapan APBD rendah	Kepala Badan Keuangan

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Resiko			Sebab			Dampak	
			Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber	C/UC	Uraian	Pihak yang Terkena
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Terlambatnya penyampaian laporan keuangan pemerintah daerah ke BPK-RI	RSO.22.37.25.05	Kepala Badan Keuangan	Penyusunan laporan keuangan SKPD tidak tepat waktu dan belum sesuai standar akuntansi pemerintah	Internal	C	Adanya temuan BPK terkait Pengelolaan Keuangan dan Predikat Opini atas Laporan Keuangan menurun	Kepala Badan Keuangan
4	Sasaran Strategis Perangkat Daerah: Meningkatkan kualitas Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) Kategori Tertib	Penyusunan laporan Barang Milik Daerah SKPD tidak tepat waktu mempengaruhi penyusunan LKPD	RSO.22.37.25.06	Kepala Badan Keuangan	Pengurus barang terlambat menyampaikan laporan pertanggungjawaban triwulan/semesteran/tahunan	Internal	C	Adanya temuan BPK terkait pengelolaan BMD dan Predikat Opini atas Laporan Keuangan menurun	Kepala Badan Keuangan
			Pengelolaan BMD belum tertib	RSO.22.37.25.07	Kepala Badan Keuangan	BMD/Aset hilang, rusak dan atau berpindahtangan	Internal	C	Data BMD/Aset tidak valid	Kepala Badan Keuangan

Ngawi, 25 Februari 2022
Menyetujui
KEPALA BADAN KEUANGAN
KABUPATEN NGAWI

Drs. TRI PUJO HANDONO
Pemimpin Muda
NIP. 19660409 198602 1 002

Keterangan :

- Kolom 1 : diisi dengan nomor urut
- Kolom 2 : diisi dengan tujuan strategis urusan wajib sebagaimana tercantum dalam RPJMD/Renstra
- Kolom 3 : diisi dengan indikator kinerja tujuan strategis
- Kolom 4 : diisi dengan uraian peristiwa yang merupakan risiko
- Kolom 5 : diisi dengan kode risiko
- Kolom 6 : diisi dengan pemilik risiko, pihak/unit yang bertanggung jawab/berkepentingan untuk mengelola risiko
- Kolom 7 : diisi dengan penyebab timbulnya risiko. Untuk mempermudah identifikasi sebab risiko, sebab risiko bisa dikategorikan ke dalam : *Man, Money, Method, Machine*, dan *Material*
- Kolom 8 : diisi dengan sumber risiko (eksternal/internal)
- Kolom 9 : diisi dengan C, jika unit kerja mampu untuk mengendalikan penyebab risiko, atau UC jika unit kerja tidak mampu mengendalikan risiko
- Kolom 10 : diisi dengan uraian akibat yang ditimbulkan jika risiko benar-benar terjadi. Untuk mempermudah identifikasi dampak risiko, dampak risiko bisa dikategorikan ke dalam: Keuangan, Kinerja, Reputasi dan Hukum
- Kolom 11 : diisi dengan pihak/unit yang menderita/terkena dampak jika risiko benar-benar terjadi.

No	Kegiatan	Indikator Keluaran	Resiko				Sebab			Dampak	
			Tahap	Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber	C/JUC	Uraian	Pihak yang Terkena
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan gaji dan tunjangan	Pelaksanaan	Geji dan Tunjangan ASN kurang	ROO.22.37.25.07	Kepala Badan Keuangan/ Sekretaris	Mutasi,promosi, kenaikan pangkat	Internal	C	Gaji dan Tunjangan ASN tidak dapat dibayarkan tepat waktu	Kepala Badan Keuangan/ Sekretaris
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan yang disusun	Pelaksanaan	Laporan Keuangan SKPD tidak tepat waktu	ROO.22.37.25.08	Kepala Badan Keuangan/ Sekretaris	Kurangnya pemahaman penyusun Laporan Keuangan SKPD	Internal	C	Penyusunan LKPD terhambat	Kepala Badan Keuangan/ Sekretaris
C. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Prosentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Kepegawaian dalam setahun									
1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas yang dibeli/diadakan	Pelaksanaan	Pengadaan tidak sesuai spesifikasi	ROO.22.37.25.09	Kepala Badan Keuangan/ Sekretaris	Fluktuasi harga dan ketersediaan stok dipenyedia	Eksternal	UC	Kualitas barang tidak sesuai	Kepala Badan Keuangan/ Sekretaris
2	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang mengikuti diklat/ Sosialisasi/Bimtek	Pelaksanaan	Pendidikan dan pelatihan tidak sesuai	ROO.22.37.25.10	Kepala Badan Keuangan/ Sekretaris	Data inventarisasi kebutuhan pendidikan dan pelatihan tidak valid	Internal	C	ASN dapat mengikuti pendidikan dan pelatihan tidak sesuai dengan tupoksi	Kepala Badan Keuangan/ Sekretaris
D. Administrasi Umum Perangkat Daerah		Prosentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Umum dalam setahun									
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan	Pelaksanaan	Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor tidak digunakan	ROO.22.37.25.11	Kepala Badan Keuangan/ Sekretaris	Belum ada yang rusak atau yang membutuhkan penggantian	Internal	C	Realisasi tidak memenuhi target	Kepala Badan Keuangan/ Sekretaris
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase pemenuhan kebutuhan ATK	Pelaksanaan	Peralatan dan Perlengkapan Kantor tidak tersedia tepat waktu	ROO.22.37.25.12	Kepala Badan Keuangan/ Sekretaris	Pelaksanaan pengadaan terlambat	Internal	C	Realisasi tidak memenuhi target	Kepala Badan Keuangan/ Sekretaris
3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Makanan dan minuman yang di sediakan	Pelaksanaan	Bahan Logistik Kantor tidak tersedia	ROO.22.37.25.13	Kepala Badan Keuangan/ Sekretaris	Agenda rapat banyak, sehingga jadwal rapat rutin tidak dilaksanakan	Internal	C	Realisasi tidak memenuhi target	Kepala Badan Keuangan/ Sekretaris
4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang yang di cetak dan digandakan serta publikasi yang dicetak	Pelaksanaan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan tidak tepat waktu	ROO.22.37.25.14	Kepala Badan Keuangan/ Sekretaris	Pelaksanaan pengadaan terlambat	Internal	C	Realisasi tidak memenuhi target	Kepala Badan Keuangan/ Sekretaris
5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Surat Kabar dan peraturan perundang-undangan yang di sediakan	Pelaksanaan	Sosialisasi peraturan perundang-undangan tidak optimal	ROO.22.37.25.15	Kepala Badan Keuangan/ Sekretaris	SKPD tidak atau terlambat menerima undangan, jadwal peserta bersamaan dengan kegiatan lain	Internal	C	SKPD yang diundang tidak mengirimkan perwakilan untuk mengikuti Sosialisasi	Peserta Sosialisasi
			Pelaksanaan	Pelaksanaan sosialisasi tidak sesuai jadwal	ROO.22.37.25.16	Kepala Badan Keuangan/ Sekretaris	Peraturan perundang-undangan belum selesai disusun	Internal	C	Pelaksanaan sosialisasi tertunda	Peserta Sosialisasi

No	Kegiatan	Indikator Keluaran	Resiko				Sebab			Dampak	
			Tahap	Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber	C/UC	Uraian	Pihak yang Terkena
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat-Rapat Koordinasi dan konsultasi yang dihadiri/Dikuti	Pelaksanaan	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD tidak optimal	ROO.22.37.25.17	Kepala Badan Keuangan/ Sekretaris	Menyesuaikan dengan undangan	Eksternal	UC	Realisasi tidak memenuhi target	Kepala Badan Keuangan/ Sekretaris
E.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang diadakan sesuai dengan kebutuhan dalam setahun									
1	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan kantor yang diadakan	Pelaksanaan	Pengadaan barang tidak sesuai spesifikasi	ROO.22.37.25.18	Kepala Badan Keuangan/ Sekretaris	Barang yang direncanakan stoknya tidak tersedia dipasar	Eksternal	UC	Tidak terpenuhinya sarana prasarana yang sesuai kebutuhan	Kepala Badan Keuangan/ Sekretaris
2	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor dan bangunan lainnya yang diadakan	Pelaksanaan	Pengadaan barang tidak sesuai spesifikasi	ROO.22.37.25.19	Kepala Badan Keuangan/ Sekretaris	Barang yang direncanakan stoknya tidak tersedia dipasar	Eksternal	UC	Barang yang dibeli tidak sesuai spesifikasi	Kepala Badan Keuangan/ Sekretaris
F.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah dalam setahun									
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat yang dikirim	Pelaksanaan	Pengiriman surat tidak optimal	ROO.22.37.25.20	Kepala Badan Keuangan/ Sekretaris	Alamat kurang lengkap, pengirim surat lalai	Internal	C	Surat tidak terkirim	Penerima Surat
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening listrik, telepon, air dan internet yang di bayarkan	Pelaksanaan	Pembayaran rekening air, telepon, listrik dan internet terlambat	ROO.22.37.25.21	Kepala Badan Keuangan/ Sekretaris	Tidak ada petugas khusus yang membayarkan	Internal	C	Kegiatan kantor terganggu	Kepala Badan Keuangan/ Sekretaris
3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah alat kebersihan yang dibeli	Pelaksanaan	Pembayaran honorarium terlambat	ROO.22.37.25.22	Kepala Badan Keuangan/ Sekretaris	Pengajuan terlambat dan kendala sistem aplikasi	Internal	C	Pembayaran honorarium terlambat	Kepala Badan Keuangan/ Sekretaris
4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Pembayaran Honor (Jumlah Orang x Bulan)	Pelaksanaan	Pembayaran honorarium terlambat	ROO.22.37.25.23	Kepala Badan Keuangan/ Sekretaris	Pengajuan terlambat dan kendala sistem aplikasi	Internal	C	Pembayaran honorarium terlambat	Kepala Badan Keuangan/ Sekretaris
G.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpelihara dalam setahun									
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah pemeliharaan kendaraan jabatan	Pelaksanaan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan tidak optimal	ROO.22.37.25.24	Kepala Badan Keuangan/ Sekretaris	Data inventarisasi pajak kendaraan tidak valid, pemeliharaan menyesuaikan kebutuhan (kerusakan insidental/diluar rencana)	Internal	C	Pajak kendaraan tidak terbayar dan alau terlambat dibayar, pemeliharaan kendaraan dilakukan berkala sesuai prioritas	Kepala Badan Keuangan/ Sekretaris

No	Kegiatan	Indikator Keluaran	Resiko				Sebab			Dampak	
			Tahap	Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber	C/UC	Uraian	Pihak yang Terkena
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	Pelaksanaan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan tidak optimal	ROO.22.37.25.25	Kepala Badan Keuangan/ Sekretaris	Data inventarisasi pajak kendaraan tidak valid, pemeliharaan menyesuaikan kebutuhan (kerusakan insidental/diluar rencana)	Internal	C	Pajak kendaraan tidak terbayar dan atau terlambat dibayar, pemeliharaan kendaraan dilakukan berkala sesuai prioritas	Kepala Badan Keuangan/ Sekretaris
3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pemeliharaan peralatan kerja	Pelaksanaan	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya tidak optimal	ROO.22.37.25.26	Kepala Badan Keuangan/ Sekretaris	Banyaknya peralatan dan mesin lainnya yang rusak bersamaan	Internal	C	Pemeliharaan dilakukan berkala sesuai prioritas	Kepala Badan Keuangan/ Sekretaris
4	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Luasan gedung kantor yang dipelihara	Pelaksanaan	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya tidak optimal	ROO.22.37.25.27	Kepala Badan Keuangan/ Sekretaris	Menyesuaikan pagu yang tersedia	Internal	C	Pemeliharaan dilakukan berkala sesuai prioritas	Kepala Badan Keuangan/ Sekretaris
			Pelaksanaan	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya tidak sesuai	ROO.22.37.25.28	Kepala Badan Keuangan/ Sekretaris	Kesalahan penyusunan KAK dan HPS	Internal	C	Hasil yang diperoleh tidak sesuai	Kepala Badan Keuangan/ Sekretaris
H.	Pengelolaan pendapatan Daerah	Persentase Peningkatan PAD Dibanding Tahun sebelumnya									
1	Perencanaan pengelolaan pajak daerah	Terencananya pengelolaan pajak daerah	Pertanggung awaban	Perencanaan pajak daerah yang kurang sesuai	ROO.22.37.25.29	Badan Keuangan/ Kepala Bidang P2D	Perubahan target pajak daerah	Eksternal	C	Perubahan rencana pengelolaan pajak daerah	Bakeu, masyarakat
2	Analisa dan pengembangan pajak daerah, serta penyusunan kebijakan pajak daerah	Pajak daerah yang dianalisa dan dikembangkan, serta kebijakan pajak daerah yang disusun	Pertanggung awaban	kurangnya bahan analisa dan pengembangan pajak daerah serta kebijakan pajak daerah	ROO.22.37.25.30	Badan Keuangan/ Kepala Bidang P2D	kurangnya koordinasi pengembangan serta penyusunan kebijakan pajak daerah	Internal	C	Analisa dan pengembangan pajak daerah serta kebijakan pajak daerah yang tidak tepat sasaran	Bakeu, masyarakat
3	Pendataan dan pendaftaran objek pajak daerah	Objek pajak daerah yang didata dan didaftar	Pertanggung awaban	Kurangnya pendataan dan pendaftaran objek pajak daerah	ROO.22.37.25.31	Badan Keuangan/ Kepala Bidang P2D	Kesulitan informasi objek pajak baru	Internal	C	Potensi pajak baru yang tidak terdata	Bakeu, masyarakat
4	Pengolahan, pemeliharaan, dan pelaporan basis data pajak daerah	Basis data pajak daerah yang diolah, dipelihara dan dilaporkan	Pertanggung awaban	Basis data pajak daerah yang tidak ter-update	ROO.22.37.25.32	Badan Keuangan/ Kepala Bidang P2D	Data pajak daerah yang kurang lengkap	Internal/ Eksternal	C	Kesulitan mencari data pajak daerah	Bakeu, masyarakat
5	Penetapan wajib pajak daerah	Wajib pajak daerah yang ditetapkan	Pertanggung awaban	Objek pajak yang tidak ditetapkan	ROO.22.37.25.33	Badan Keuangan/ Kepala Bidang P2D	Adanya kekurangan bahan penetapan pajak	Internal	C	Penerimaan pajak daerah yang kurang maksimal	Bakeu, masyarakat
6	Pelayanan dan konsultasi pajak daerah	Wajib pajak yang dilayani dan konsultasi	Pertanggung awaban	Pelayanan dan konsultasi pajak daerah yang kurang maksimal	ROO.22.37.25.34	Badan Keuangan/ Kepala Bidang P2D	Petugas yang kurang memadai dan berkas wajib pajak yang kurang lengkap	Internal	C	Kepuasan wajib pajak dalam memperoleh pelayanan dan konsultasi	Bakeu, masyarakat
7	Penelitian dan verifikasi data pelaporan pajak daerah	Data pelaporan pajak daerah yang diteliti dan diverifikasi	Pertanggung awaban	Terlambatnya penelitian dan verifikasi data pelaporan pajak daerah	ROO.22.37.25.35	Badan Keuangan/ Kepala Bidang P2D	Terlambatnya penelitian dan verifikasi data pelaporan pajak daerah	Internal	C	Laporan pajak daerah yang tidak akurat	Bakeu, masyarakat
8	Penagihan pajak daerah	Pajak daerah yang tertagih	Pertanggung awaban	Pajak daerah yang tidak tertagih	ROO.22.37.25.36	Badan Keuangan/ Kepala Bidang P2D	Kesulitan dalam penagih pajak daerah	Internal	C	Penerimaan pajak daerah yang kurang maksimal	Bakeu, masyarakat

No	Kegiatan	Indikator Keluaran	Resiko				Sebab			Dampak	
			Tahap	Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber	C/UC	Uraian	Pihak yang Terkena
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	Pengendalian, pemeriksaan dan pengawasan pajak daerah	Terkendalinya pemeriksaan dan pengawasan pajak daerah	Pertanggungjawaban	Pengendalian, pemeriksaan dan pengawasan pajak daerah yang kurang maksimal	ROO.22.37.25.37	Badan Keuangan/ Kepala Bidang P2D	Kurangnya koordinasi pihak-pihak terkait	Internal/ Eksternal	C	Pengendalian, pemeriksaan dan pengawasan pajak daerah yang kurang maksimal	Bakeu, masyarakat
I.	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Persentase penyusunan perencanaan anggaran yang tepat waktu									
1	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang disusun	Sudah dilaksanakan	KUA dan PPAS tidak segera tersusun	ROO.22.37.25.38	Kepala Badan Keuangan/ Kepala Bidang Perencanaan Anggaran Daerah	Usulan Kegiatan dan Anggaran SKPD masih kurang wajar	Eksternal	C	Penyusunan KUA dan PPAS tidak tepat waktu	Kepala Badan Keuangan, SKPD terkait
2	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan PPAS yang disusun	Pelaksanaan	Perubahan KUA dan Perubahan PPAS tidak segera tersusun	ROO.22.37.25.39	Kepala Badan Keuangan/ Kepala Bidang Perencanaan Anggaran Daerah	Usulan Kegiatan dan Anggaran SKPD masih kurang wajar	Eksternal	C	Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS tidak tepat waktu	Kepala Badan Keuangan, SKPD terkait
3	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD yang disusun	akan dilaksanakan	Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD terlambat realisasi, melewati skedul yang sudah ditentukan	ROO.22.37.25.40	Kepala Badan Keuangan/ Kepala Bidang Perencanaan Anggaran Daerah	SKPD terlambat dalam Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Eksternal	C	Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD tidak tepat waktu	Kepala Badan Keuangan, SKPD terkait
4	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD yang disusun	akan dilaksanakan	Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD terlambat realisasi, melewati skedul yang sudah ditentukan	ROO.22.37.25.41	Kepala Badan Keuangan/ Kepala Bidang Perencanaan Anggaran Daerah	SKPD terlambat dalam Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Eksternal	C	Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD tidak tepat waktu	Kepala Badan Keuangan, SKPD terkait
5	Koordinasi Penyusunan peraturan daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD	Jumlah Dokumen Informasi Keuangan daerah yang dapat di akses publik	akan dilaksanakan	Penyusunan peraturan daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD, melewati skedul yang sudah ditentukan	ROO.22.37.25.42	Kepala Badan Keuangan/ Kepala Bidang Perencanaan Anggaran Daerah	Penyusunan peraturan daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD lambat terealisasi	Eksternal	C	Penyusunan peraturan daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD tidak tepat waktu	Kepala Badan Keuangan, SKPD terkait
6	Koordinasi, Penyusunan peraturan daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Dokumen yang disusun (Dokumen Perda dan Perbup APBD)	Pelaksanaan	Penyusunan peraturan daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran Perubahan APBD, melewati skedul yang sudah ditentukan	ROO.22.37.25.43	Kepala Badan Keuangan/ Kepala Bidang Perencanaan Anggaran Daerah	Penyusunan peraturan daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran Perubahan APBD lambat terealisasi	Eksternal	C	Penyusunan peraturan daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran Perubahan APBD tidak tepat waktu	Kepala Badan Keuangan, SKPD terkait
J.	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Persentase Laporan/ Dokumen Pengelolaan Perbendaharaan yang disusun dan disampaikan tepat waktu									
1	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Laporan Posisi Kas Harian yang disusun dan Prosentase SILPA terhadap APBD	Pelaksanaan	Pelaporan tidak tepat waktu	ROO.22.37.25.44	Kepala Badan Keuangan/ Kepala Bidang Perbendaharaan	Menumpuknya Laporan Posisi Kas Harian	Eksternal	C	SKPD Penghasil belum tertib menginput data transaksi	Kepala Badan Keuangan

No	Kegiatan	Indikator Keluaran	Resiko				Sebab			Dampak	
			Tahap	Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber	C/UC	Uraian	Pihak yang Terkena
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	Penyiapan, pelaksanaan pengendalian dan penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah SP2D, SPD dan SPM yang diterbitkan	Pelaksanaan	Kenaikan Jumlah Berkas pencairan banyak di akhir Tahun	ROO.22.37.25.45	Kepala Badan Keuangan/ Kepala Bidang Perbendaharaan	Kenaikan Jumlah Berkas pencairan banyak di akhir Tahun	Eksternal/ Internal	C	Kurangnya Pemahaman pada SKPD terkait penatausahaan belanja daerah dan SDM terbatas	Kepala Badan Keuangan dan Pemda
3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PEK)	Jumlah Laporan / Dokumen Rekonsiliasi	Pelaksanaan	Kurang teliti dalam penyusunan dan pengitungan pembayaran pada pihak ketiga akan mengakibatkan aliran kas tidak cocok	ROO.22.37.25.46	Kepala Badan Keuangan/ Kepala Bidang Perbendaharaan	Kurangnya pemahaman aparatur	Eksternal	C	Pelaporan yang terlambat	Kepala Badan Keuangan
		Jumlah Pembinaan SKPD	Pelaksanaan	Kurangnya Pembinaan akan mengakibatkan kesalahan dalam penatausahaan	ROO.22.37.25.47	Kepala Badan Keuangan/ Kepala Bidang Perbendaharaan	Kurangnya kemampuan aparatur dalam pengelolaan keuangan	Eksternal/ Internal	C	Penyerapan terlambat dan salah pembebanan Belanja	Kepala Badan Keuangan
4	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Rekonsiliasi yang dilaksanakan	Pelaksanaan	Kurang teliti dalam penginputan, penyusunan dan pengitungan akan mengakibatkan laporan tidak tepat waktu	ROO.22.37.25.48	Kepala Badan Keuangan/ Kepala Bidang Perbendaharaan	Kurangnya pemahaman aparatur	Eksternal/ Internal	C	Pelaporan yang terlambat	Kepala Badan Keuangan
K.	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Persentase laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD disusun tepat waktu dan Sesuai SAP									
1	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Jumlah koordinasi akuntansi Penerimaan Kas Daerah yang dilaksanakan, Jumlah koordinasi akuntansi Pengeluaran Kas Daerah yang dilaksanakan, Jumlah Verifikasi dan Pengujian atas Bukti Memorial yang dilakukan	Pelaksanaan	koordinasi akuntansi Penerimaan Kas Daerah tidak terlaksana	ROO.22.37.25.49	Kepala Badan Keuangan/ Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Laporan Keuangan terlambat disusun oleh SKPD	Eksternal	C	Penyampaian LKPD ke BPK akan terlambat	Kepala Derah Badan Keuangan SKPD
2	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban.	Jumlah Rekonsiliasi Realisasi Pendapatan dan Belanja Serta Pembiayaan yang dilaksanakan	Pelaksanaan	Rekonsiliasi Realisasi Pendapatan dan Belanja Serta Pembiayaan tidak terlaksana	ROO.22.37.25.50	Kepala Badan Keuangan/ Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Laporan Keuangan terlambat disusun oleh SKPD	Eksternal	C	Penyampaian LKPD ke BPK akan terlambat	Kepala Derah Badan Keuangan SKPD
3	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran yang disusun	Pelaksanaan	Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran tidak dapat disusun	ROO.22.37.25.51	Kepala Badan Keuangan/ Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Laporan Keuangan terlambat disusun oleh SKPD	Eksternal	C	Penundaan Penyaluran DAU	Kepala Derah Badan Keuangan SKPD

No	Kegiatan	Indikator Keluaran	Resiko				Sebab			Dampak	
			Tahap	Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber	C/UC	Uraian	Pihak yang Terkena
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan PEMDA yang disusun	Pelaksanaan	Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan PEMDA tidak dapat dikonsolidasi	ROO.22.37.25.52	Kepala Badan Keuangan/ Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Laporan Keuangan terlambat disusun oleh SKPD	Eksternal	C	Penyampaian LKPD ke BPK akan terlambat	Kepala Derah Badan Keuangan SKPD
5	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rancangan Peraturan Daerah dan Ranperbup Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kab yang disusun	Pelaksanaan	Dokumen Rancangan Peraturan Daerah dan Ranperbup Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kab tidak tersusun	ROO.22.37.25.53	Kepala Badan Keuangan/ Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Laporan Keuangan Pemerintah Daerah terlambat disusun oleh SKPD	Eksternal	C	Penyampaian LKPD ke Gubernur dan Kemendagri akan terlambat	Kepala Derah Badan Keuangan SKPD
6	Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD yang disusun	Pelaksanaan	Dokumen Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tidak disusun	ROO.22.37.25.54	Kepala Badan Keuangan/ Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Laporan Keuangan Pemerintah Daerah terlambat disusun oleh SKPD	Eksternal	C	Penyampaian LKPD ke Gubernur dan Kemendagri akan terlambat	Kepala Derah Badan Keuangan SKPD
7	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah yang disusun	Pelaksanaan	Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah yang tidak disusun	ROO.22.37.25.55	Kepala Badan Keuangan/ Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Laporan Keuangan terlambat disusun oleh SKPD	Eksternal	C	Penyampaian LKPD ke BPK akan terlambat	Kepala Derah Badan Keuangan SKPD
8	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Pembinaan dan Sosialisasi Tentang Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Sesuai Sistem Akuntansi Pemerintah yang dilaksanakan	Pelaksanaan	Pembinaan dan Sosialisasi Tentang Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Sesuai Sistem Akuntansi Pemerintah yang tidak terlaksana	ROO.22.37.25.56	Kepala Badan Keuangan/ Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Laporan Keuangan terlambat disusun oleh SKPD	Eksternal	C	Penyampaian LKPD ke BPK akan terlambat	Kepala Derah Badan Keuangan SKPD
L.	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Laporan/ Dokumen Barang Milik Daerah yang disusun dan disampaikan tepat waktu									
1	Penyusunan Standart Harga	Jumlah standar harga yang disusun	Pelaksanaan	standar satuan harga tidak segera tersusun	ROO.22.37.25.57	Kepala Badan Keuangan/ Kepala Bidang Pengelolaan BMD	SKPD terlambat dalam penyampaian usulan standar satuan harga	Eksternal	C	Penyusunan standar satuan harga tidak tepat waktu	Kepala Badan Keuangan, SKPD terkait
2	Penyusunan Perencanaan kebutuhan BMD	Jumlah RKBMD	Pelaksanaan	RKBMD tidak tersusun	ROO.22.37.25.58	Kepala Badan Keuangan/ Kepala Bidang Pengelolaan BMD	SKPD terlambat dalam penyampaian usulan RKBMD	Eksternal	C	Penyusunan RKBMD tidak tepat waktu	Kepala Badan Keuangan, SKPD terkait
3	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan BMD	Jumlah kebijakan pengelolaan BMD	Pelaksanaan	Kebijakan pengelolaan BMD tidak tersusun	ROO.22.37.25.59	Kepala Badan Keuangan/ Kepala Bidang Pengelolaan BMD	SKPD terlambat dalam penyampaian usulan status penggunaan BMD	Internal	C	Penyusunan SK penetapan Staus Penggunaan BMD tidak tepat waktu	Kepala Badan Keuangan, SKPD terkait

No	Kegiatan	Indikator Keluaran	Resiko				Sebab			Dampak	
			Tahap	Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber	C/UC	Uraian	Pihak yang Terkena
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	Penatausahaan BMD	jumlah laporan penatausahaan BMD	penatausahaan	daftar aset tetap tidak tersusun	ROO.22.37.25.60	Kepala Badan Keuangan/ Kepala Bidang Pengelolaan BMD	data aset tidak akuntabel	Internal	C	data aset tidak lengkap dan tidak akurat	Kepala Badan Keuangan, SKPD terkait
5	Inventarisasi BMD	Jumlah laporan hasil Inventarisasi (LHI) BMD	Pelaksanaan	Inventarisasi BMD tidak terlaksana dengan baik	ROO.22.37.25.61	Kepala Badan Keuangan/ Kepala Bidang Pengelolaan BMD	data aset tidak terinventarisir	Internal	C	data aset tidak up to date	Kepala Badan Keuangan, SKPD terkait
6	Pengamanan BMD	Jumlah laporan hasil pengamanan BMD	Pelaksanaan	Pengamanan BMD tidak terlaksana dengan baik	ROO.22.37.25.62	Kepala Badan Keuangan/ Kepala Bidang Pengelolaan BMD	Pengamanan BMD kurang baik	Internal/ Eksternal	C	rawan terjadi kehilangan aset	Kepala Badan Keuangan, SKPD terkait
7	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan BMD	Jumlah Dokumen Hasil optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan BMD	Pelaksanaan	Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan BMD tidak optimal	ROO.22.37.25.63	Kepala Badan Keuangan/ Kepala Bidang Pengelolaan BMD	Pengelolaan BMD tidak sesuai dengan prosedur	Internal/ Eksternal	C	Pengelolaan BMD tidak optimal	Kepala Badan Keuangan, SKPD terkait
8	Rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan BMD	Jumlah laporan hasil rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan BMD	Pelaksanaan	Rekonsiliasi BMD tidak terlaksana dengan baik	ROO.22.37.25.64	Kepala Badan Keuangan/ Kepala Bidang Pengelolaan BMD	SKPD terlambat dalam penyampaian laporan rekonsiliasi	Internal/ Eksternal	C	Rekonsiliasi BMD tidak tepat waktu	Kepala Badan Keuangan, SKPD terkait
9	Penyusunan laporan BMD	Jumlah laporan BMD yang disusun	Pelaksanaan	Laporan BMD tidak tepat waktu	ROO.22.37.25.65	Kepala Badan Keuangan/ Kepala Bidang Pengelolaan BMD	Nilai aset tidak akuntabel	Internal	C	Nilai aset tidak tepat dan tidak akurat	Kepala Badan Keuangan, SKPD terkait
10	Pembinaan Pengelolaan BMD Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah orang yang mengikuti pembinaan Pengelolaan BMD Pemerintah Kabupaten/Kota	Pelaksanaan	Pembinaan tidak berjalan dengan baik	ROO.22.37.25.66	Kepala Badan Keuangan/ Kepala Bidang Pengelolaan BMD	SKPD tidak menindaklanjuti hasil pembinaan	Internal/ Eksternal	C	Pengelolaan BMD tidak optimal	Kepala Badan Keuangan, SKPD terkait

Ngawi, 25 Februari 2022
Menyetujui
KEPALA BADAN KEUANGAN
KABUPATEN NGAWI

Drs. TRI PUJO HANDONO
Pembina Utama Muda
NIP. 19660409 198602 1 002

Form 9
Formulir Hasil Analisis Risiko

Nama Pemerintah Daerah : Pemerintah Kabupaten Ngawi
 Tahun Penilaian : 2022
 Tujuan Strategis : Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan yang efektif dan akuntabel dalam memberikan pelayanan publik yang prima
 Urusan Pemerintahan : Unsur Penunjang

No.	"Risiko" yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Analisis Risiko		
			Skala Dampak*)	Skala Kemungkinan*)	Skala Risiko
1	2	3	4	5	6 = 4 x 5
I	Risiko Strategis				
II	Risiko Strategis Perangkat Daerah 1: Badan Keuangan				
1	Nilai LHE AKIP tidak tercapai sesuai target	RSO.22.37.25.01	4	3	12
2	Persentase PAD kecil	RSO.22.37.25.02	3	3	9
3	Penetapan APBD tidak tepat waktu	RSO.22.37.25.03	4	1	4
4	Pelaksanaan APBD tidak tepat waktu	RSO.22.37.25.04	4	2	8
5	Terlambatnya penyampaian laporan keuangan pemerintah daerah ke BPK-RI	RSO.22.37.25.05	4	4	16
6	Penyusunan laporan Barang Milik Daerah SKPD tidak tepat waktu mempengaruhi penyusunan LKPD	RSO.22.37.25.06	4	4	16
7	Pengelolaan BMD belum tertib	RSO.22.37.25.07	4	3	12
III	Risiko Operasional Perangkat Daerah 1: Badan Keuangan				
1	Penyusunan dokumen perencanaan (Renstra, Renja, PK, RKT) tidak tepat waktu	ROO.22.37.25.01	4	2	8
2	Dokumen perencanaan tidak sinkron/selaras	ROO.22.37.25.02	4	2	8
3	Penganggaran tidak sesuai kebutuhan	ROO.22.37.25.03	4	2	8
4	Penyusunan dokumen penganggaran (RKA,DPA,Anggaran Kas) tidak tepat waktu	ROO.22.37.25.04	4	2	8
5	Kinerja Perangkat Daerah tidak memenuhi target	ROO.22.37.25.05	4	3	12
6	Data Evaluasi tidak valid	ROO.22.37.25.06	4	3	12
7	Gaji dan Tunjangan ASN kurang	ROO.22.37.25.07	3	2	6
8	Laporan Keuangan SKPD tidak tepat waktu	ROO.22.37.25.08	4	3	12
9	Pengadaan tidak sesuai spesifikasi	ROO.22.37.25.09	3	2	6
10	Pendidikan dan pelatihan tidak sesuai	ROO.22.37.25.10	3	2	6
11	Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor tidak digunakan	ROO.22.37.25.11	2	1	2
12	Peralatan dan Perlengkapan Kantor tidak tersedia tepat waktu	ROO.22.37.25.12	2	2	4
13	Bahan Logistik Kantor tidak tersedia	ROO.22.37.25.13	2	2	4
14	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan tidak tepat waktu	ROO.22.37.25.14	2	1	2
15	Sosialisasi peraturan perundang-undangan tidak optimal	ROO.22.37.25.15	3	3	9
	Sosialisasi peraturan perundang-undangan tidak optimal	ROO.22.37.25.16	3	3	9
16	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD tidak optimal	ROO.22.37.25.17	3	3	9
17	Pengadaan barang tidak sesuai spesifikasi	ROO.22.37.25.18	3	3	9
18	Pengadaan barang tidak sesuai spesifikasi	ROO.22.37.25.19	3	3	9
19	Pengiriman surat tidak optimal	ROO.22.37.25.20	1	1	1

No.	"Risiko" yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Analisis Risiko		
			Skala Dampak*)	Skala Kemungkinan*)	Skala Risiko
1	2	3	4	5	6 = 4 x 5
20	Pembayaran rekening air, telepon, listrik dan internet terlambat	ROO.22.37.25.21	2	1	2
21	Pembayaran honorarium terlambat	ROO.22.37.25.22	3	2	6
22	Pembayaran honorarium terlambat	ROO.22.37.25.23	3	2	6
23	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan tidak optimal	ROO.22.37.25.24	2	1	2
24	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan tidak optimal	ROO.22.37.25.25	2	1	2
25	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya tidak optimal	ROO.22.37.25.26	2	2	4
26	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya tidak optimal	ROO.22.37.25.27	2	2	4
27	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya tidak sesuai	ROO.22.37.25.28	3	2	6
28	Perencanaan pajak daerah yang kurang sesuai	ROO.22.37.25.29	3	2	6
29	kurangnya bahan analisa dan pengembangan pajak daerah serta kebijakan pajak daerah	ROO.22.37.25.30	3	2	6
30	Kurangnya pendataan dan pendaftaran objek pajak daerah	ROO.22.37.25.31	3	2	6
31	Basis data pajak daerah yang tidak ter-update	ROO.22.37.25.32	4	4	16
32	Objek pajak yang tidak ditetapkan	ROO.22.37.25.33	2	2	4
33	Pelayanan dan konsultasi pajak daerah yang kurang maksimal	ROO.22.37.25.34	3	2	6
34	Terlambatnya penelitian dan verifikasi data pelaporan pajak daerah	ROO.22.37.25.35	3	2	6
35	Pajak daerah yang tidak tertagih	ROO.22.37.25.36	3	4	12
36	Pengendalian, pemeriksaan dan pengawasan pajak daerah yang kurang maksimal	ROO.22.37.25.37	3	2	6
37	KUA dan PPAS tidak segera tersusun	ROO.22.37.25.38	3	3	9
38	Perubahan KUA dan Perubahan PPAS tidak segera tersusun	ROO.22.37.25.39	3	3	9
39	Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD terlambat realisasi, melewati skedul yang sudah ditentukan	ROO.22.37.25.40	4	3	12
40	Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD terlambat realisasi, melewati skedul yang sudah ditentukan	ROO.22.37.25.41	3	2	6
41	Penyusunan peraturan daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD, melewati skedul yang sudah ditentukan	ROO.22.37.25.42	4	4	16
42	Penyusunan peraturan daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran Perubahan APBD, melewati skedul yang sudah ditentukan	ROO.22.37.25.43	3	2	6
43	Pelaporan tidak tepat waktu	ROO.22.37.25.44	4	4	16
44	Kenaikan Jumlah Berkas pencairan banyak di akhir Tahun	ROO.22.37.25.45	3	3	9
45	Kurang teliti dalam penyusunan dan penghitungan pembayaran pada pihak ketiga akan mengakibatkan aliran kas tidak cocok	ROO.22.37.25.46	3	3	9

No.	"Risiko" yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Analisis Risiko		
			Skala Dampak*)	Skala Kemungkinan*)	Skala Risiko
1	2	3	4	5	6 = 4 x 5
46	Kurangnya Pembinaan akan mengakibatkan kesalahan dalam penatausahaan	ROO.22.37.25.47	3	3	9
47	Kurang teliti dalam penginputan, penyusunan dan pengitungan akan mengakibatkan laporan tidak tepat waktu	ROO.22.37.25.48	3	3	9
48	koordinasi akuntansi Penerimaan Kas Daerah tidak terlaksana	ROO.22.37.25.49	4	4	16
49	Rekonsiliasi Realisasi Pendapatan dan Belanja Serta Pembiayaan tidak terlaksana	ROO.22.37.25.50	3	3	9
50	Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran tidak dapat disusun	ROO.22.37.25.51	3	2	6
51	Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan PEMDA tidak dapat dikonsolidasi	ROO.22.37.25.52	3	1	3
52	Dokuman Rancangan Peraturan Daerah dan Ranperbup Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kab tidak tersusun	ROO.22.37.25.53	4	4	16
53	Dokumen Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tidak disusun	ROO.22.37.25.54	3	2	6
54	Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah yang tidak disusun	ROO.22.37.25.55	3	3	9
55	Pembinaan dan Sosialisasi Tentang Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Sesuai Sistem Akuntansi Pemerintah yang tidak terlaksana	ROO.22.37.25.56	3	3	9
56	standar satuan harga tidak segera tersusun	ROO.22.37.25.57	4	3	12
57	RKBMD tidak tersusun	ROO.22.37.25.58	4	3	12
58	Kebijakan pengelolaan BMD tidak tersusun	ROO.22.37.25.59	3	2	6
59	daftar aset tetap tidak tersusun	ROO.22.37.25.60	3	2	6
60	Inventarisasi BMD tidak terlaksana dengan baik	ROO.22.37.25.61	3	2	6
61	Pengamanan BMD tidak terlaksana dengan baik	ROO.22.37.25.62	4	2	8
62	Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan BMD tidak optimal	ROO.22.37.25.63	4	3	12
63	Rekonsiliasi BMD tidak terlaksana dengan baik	ROO.22.37.25.64	4	3	12
64	Laporan BMD tidak tepat waktu	ROO.22.37.25.65	4	4	16
65	Pembinaan tidak berjalan dengan baik	ROO.22.37.25.66	3	1	3

Menyetujui
 KEPALA BADAN KEUANGAN
 KABUPATEN NGAWI

Drs. TRI PUJO HANDONO
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19660409 198602 1 002



Form 10
Kertas Kerja Daftar Risiko Prioritas

Nama Pemerintah Daerah : Pemerintah Kabupaten Ngawi
 Tahun Penilaian : 2022
 Tujuan Strategis : Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan yang efektif dan akuntabel dalam memberikan pelayanan publik yang prima
 Urusan Pemerintahan : Unsur Penunjang

No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Skala Risiko	Pemilik Risiko	Penyebab	Dampak
1	2	3	4	5	6	7
I	Risiko Strategis					
II	Risiko Strategis Perangkat Daerah 1 : Badan Keuangan					
1	Nilai LHE AKIP tidak tercapai sesuai target	RSO.22. 37.25.01	12	Kepala Badan Keuangan	Data dukung untuk pemenuhan LKE tidak lengkap	Nilai LHE AKIP tidak sesuai target
2	Terlambatnya penyampaian laporan keuangan pemerintah daerah ke BPK-RI	RSO.22. 37.25.05	16	Kepala Badan Keuangan	Penyusunan laporan keuangan SKPD tidak tepat waktu dan belum sesuai standar akuntansi pemerintah	Adanya temuan BPK terkait Pengelolaan Keuangan dan Predikat Opini atas Laporan Keuangan menurun
3	Penyusunan laporan Barang Milik Daerah SKPD tidak tepat waktu mempengaruhi penyusunan LKPD	RSO.22. 37.25.06	16	Kepala Badan Keuangan	Pengurus barang terlambat menyampaikan laporan pertanggungjawaban triwulan/semesteran/tahunan	Adanya temuan BPK terkait pengelolaan BMD dan Predikat Opini atas Laporan Keuangan menurun
4	Pengelolaan BMD belum tertib	RSO.22. 37.25.07	12	Kepala Badan Keuangan	BMD/Aset hilang, rusak dan atau berpindahtangan	Data BMD/Aset tidak valid
III	Risiko Operasional Perangkat Daerah 1: Badan Keuangan					
1	Kinerja Perangkat Daerah tidak memenuhi target	ROO.22. 37.25.05	12	Kepala Bidang	Banyak anggaran yang tidak terealisasi sesuai anggaran kas	Perencanaan kurang tepat
2	Data Evaluasi tidak valid	ROO.22. 37.25.06	12	Kepala Bidang	Kurang cermat dalam menetapkan indikator kinerja yang ingin dicapai dan pengisian target	Data untuk evaluasi tidak valid

No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Skala Risiko	Pemilik Risiko	Penyebab	Dampak
1	2	3	4	5	6	7
3	Laporan Keuangan SKPD tidak tepat waktu	ROO.22. 37.25.08	12	Kepala Bidang	Kurangnya pemahaman penyusun Laporan Keuangan SKPD	Penyusunan LKPD terhambat
4	Basis data pajak daerah yang tidak ter-update	ROO.22. 37.25.32	16	Kepala Bidang	Data pajak daerah yang kurang lengkap	Kesulitan mencari data pajak daerah
5	Pajak daerah yang tidak tertagih	ROO.22. 37.25.36	12	Kepala Bidang	Kesulitan dalam penagih pajak daerah	Penerimaan pajak daerah yang kurang maksimal
6	Penyusunan peraturan daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD, melewati skedul yang sudah ditentukan	ROO.22. 37.25.42	16	Kepala Bidang	Penyusunan peraturan daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD tidak tepat waktu	Dokumen peraturan daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD terlambat tersusun
7	Jumlah Penyerapan yang tidak sesuai perencanaan	ROO.22. 37.25.44	16	Kepala Bidang	Banyak anggaran yang tidak terealisasi sesuai perencanaan	Perencanaan kurang tepat dan perubahan aturan
8	koordinasi akuntansi Penerimaan dan pengeluaran Kas Daerah tidak terlaksanan	ROO.22. 37.25.49	16	Kepala Bidang	Laporan Keuangan terlambat disusun oleh SKPD	Penyampaian LKPD ke BPK akan terlambat
9	Dokuman Rancangan Peraturan Daerah dan Ranperbup Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kab tidak tersusun	ROO.22. 37.25.53	16	Kepala Bidang	Laporan Keuangan Pemerintah Daerah terlambat disusun oleh SKPD	Penyampaian LKPD ke Gubernur dan Kemendagri akan terlambat
10	Laporan BMD tidak tepat waktu	ROO.22.37.25.65	16	Kepala Bidang	Kurangnya koordinasi dengan SKPD	Perencanaan kurang tepat

Ngawi, 25 Februari 2022
Menyetujui
KEPALA BADAN KEUANGAN
KABUPATEN NGAWI

Drs. TRI PUJO HANDONO
Pembina Utama Muda
NIP. 19660409 198602 1 002

Form 12

Rencana Tindak Pengendalian untuk Mengatasi Risiko

Nama Pemerintah Daerah : Pemerintah Kabupaten Ngawi
 Tahun Penilaian : 2022
 Tujuan Strategis : Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan yang efektif dan akuntabel dalam memberikan pelayanan publik yang prima
 Urusan Pemerintahan : Unsur Penunjang

No	Pernyataan Risiko	Pengendalian yang Dibangun untuk Mengatasi Risiko	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
1	2	3	4	5
I	Risiko Strategis Pemerintah Daerah			
II	Risiko Strategis Perangkat Daerah Badan Keuangan (2022-2026)			
1	Nilai LHE AKIP tidak tercapai sesuai target	Membuat jadwal dan rencana aksi untuk pemenuhan dokumen di setiap komponen penilaian pada LKE SAKIP	Kepala Dinas, Sekretaris, Kabid, Kasubbag /Kasubbid, JFT, JFU	Triwulan IV 2022
2	Terlambatnya penyampaian laporan keuangan pemerintah daerah ke BPK-RI	Melakukan Rekonsiliasi dengan SKPD	Kepala Dinas, Sekretaris, Kabid, Kasubbag /Kasubbid, JFT, JFU	Triwulan IV 2022
		Bimbingan Teknis penyusunan Laporan Keuangan SKPD sesuai SAP	Kepala Dinas, Sekretaris, Kabid, Kasubbag /Kasubbid, JFT, JFU	Triwulan IV 2022
		Berkoordinasi dengan APIP untuk melakukan Reviu	Kepala Dinas, Sekretaris, Kabid, Kasubbag /Kasubbid, JFT, JFU	Triwulan IV 2022
3	Penyusunan laporan Barang Milik Daerah SKPD tidak tepat waktu mempengaruhi penyusunan LKPD	Melakukan Rekonsiliasi dengan SKPD	Kepala Dinas, Sekretaris, Kabid, Kasubbag /Kasubbid, JFT, JFU	Triwulan IV 2022
		Bimbingan Teknis penyusunan laporan BMD	Kepala Dinas, Sekretaris, Kabid, Kasubbag /Kasubbid, JFT, JFU	Triwulan IV 2022

No	Pernyataan Risiko	Pengendalian yang Dibangun untuk Mengatasi Risiko	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
1	2	3	4	5
		Berkoordinasi dengan APIP untuk melakukan Reviu	Kepala Dinas, Sekretaris, Kabid, Kasubbag /Kasubbid, JFT, JFU	Triwulan IV 2022
4	Pengelolaan BMD belum tertib	Evaluasi berkala terhadap Kartu Inventarisasi Barang (KIB)	Kepala Dinas, Sekretaris, Kabid, Kasubbag /Kasubbid, JFT, JFU	Triwulan IV 2022
III	Risiko Operasional Perangkat Daerah Badan Keuangan (2022-2026)			
1	Kinerja Perangkat Daerah tidak memenuhi target	Monitoring dan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan, jika tidak dapat dilaksanakan sesuai target segera mengidentifikasi kendala dan merumuskan penyelesaian kendala tersebut	Kepala Dinas, Sekretaris, Kabid, Kasubbag /Kasubbid, JFT, JFU	Triwulan IV 2022
2	Data Evaluasi tidak valid	Berkoordinasi dengan bidang terkait	Kepala Dinas, Sekretaris, Kabid, Kasubbag /Kasubbid, JFT, JFU	Triwulan IV 2022
3	Laporan Keuangan SKPD tidak tepat waktu	Koordinasi intensif antara bendahara pengeluaran/penerimaan dengan PPK	Kepala Dinas, Sekretaris, Kabid, Kasubbag /Kasubbid, JFT, JFU	Triwulan IV 2022
4	Basis data pajak daerah yang tidak ter-update	Evaluasi pembaruan basis data pajak daerah secara periodik	Kepala Badan	Triwulan I, II, III, IV
5	Pajak daerah yang tidak tertagih	Evaluasi atas pajak daerah yang tidak tertagih	Kepala Badan	Triwulan III

No	Pernyataan Risiko	Pengendalian yang Dibangun untuk Mengatasi Risiko	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
1	2	3	4	5
6	Penyusunan peraturan daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD, melewati skedul yang sudah ditentukan	Koordinasi dengan SKPD lebih intens	Kepala Bidang Perencanaan Anggaran Daerah	Triwulan I, II, III, IV
7	Jumlah Penyerapan yang tidak sesuai perencanaan	Melakukan Rekonsiliasi	Kepala Bidang Perbendaharaan Daerah	Triwulan I, II, III, IV
8	koordinasi akuntansi Penerimaan dan pengeluaran Kas Daerah tidak terlaksanan	Koordinasi dengan SKPD lebih intens	Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan Daerah	Triwulan I, II, III, IV
9	Dokuman Rancangan Peraturan Daerah dan Ranperbup Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kab tidak tersusun	Koordinasi dengan SKPD lebih intens	Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan Daerah	Triwulan I, II, III, IV
10	Laporan BMD tidak tepat waktu	evaluasi atas Implementasi Permendagri 47 Tahun 2021	Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah	Triwulan I, II, III, IV

Ngawi, 25 Februari 2022

Menyetujui
 KEPALA BADAN KEUANGAN
 KABUPATEN NGAWI

Drs. TRI PUJO HANDONO
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19660409 198602 1 002

Form 13.

Formulir Kertas Kerja Penilaian atas Kegiatan Pengendalian yang Ada dan Masih Dibutuhkan

Nama Pemerintah Daerah : Pemerintah Kabupaten Ngawi
 Tahun Penilaian : 2022
 Tujuan Strategis : Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan yang efektif dan akuntabel dalam memberikan pelayanan
 Urusan Pemerintahan : Unsur Penunjang

No	Resiko Prioritas	Kode Risiko	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *)	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
1	2	3	4	5	6	7	8
I	Risiko Strategis						
II	Risiko Strategis Badan Keuangan						
1	Nilai LHE AKIP tidak tercapai sesuai target	RSO.22. 37.25.01	Membuat jadwal dan rencana aksi untuk pemenuhan dokumen di setiap komponen penilaian pada LKE SAKIP	Jadwal dan rencana aksi yang sudah dibuat tidak dilaksanakan	Monitoring dan pengendalian secara berkala	Kepala Dinas, Sekretaris, Kabid	Triwulan IV 2022
2	Tertambatnya penyampaian laporan keuangan pemerintah daerah ke BPK-RI	RSO.22. 37.25.05	Melakukan Rekonsiliasi dengan SKPD	Hasil Rekonsiliasi tidak valid atau berubah-ubah	Dituangkan dalam Berita Acara Hasil Rekonsiliasi	Kepala Dinas, Sekretaris, Kabid	Triwulan IV 2022
			Bimbingan Teknis penyusunan Laporan Keuangan SKPD sesuai SAP	Peserta tidak hadir atau diwakilkan	Peserta yang diundang disebutkan secara spesifik didalam undangan dan diwajibkan hadir	Kepala Dinas, Sekretaris, Kabid, Kasubbag /Kasubbid, JFT	Triwulan IV 2022
			Berkoordinasi dengan APIP untuk melakukan Reviu	Jadwal Reviu tidak sesuai	Koordinasi intensif terkait jadwal reviu	Kepala Dinas, Sekretaris, Kabid	Triwulan IV 2022
3	Penyusunan laporan Barang Milik Daerah SKPD tidak tepat waktu mempengaruhi penyusunan LKPD	RSO.22. 37.25.06	Melakukan Rekonsiliasi dengan SKPD	Hasil Rekonsiliasi tidak valid atau berubah-ubah	Dituangkan dalam Berita Acara Hasil Rekonsiliasi	Kepala Dinas, Sekretaris, Kabid	Triwulan IV 2022
			Bimbingan Teknis penyusunan laporan BMD	Peserta tidak hadir atau diwakilkan	Peserta yang diundang disebutkan secara spesifik didalam undangan dan diwajibkan hadir	Kepala Dinas, Sekretaris, Kabid, Kasubbag /Kasubbid, JFT	Triwulan IV 2022
			Berkoordinasi dengan APIP untuk melakukan Reviu	Jadwal Reviu tidak sesuai	Koordinasi intensif terkait jadwal reviu	Kepala Dinas, Sekretaris, Kabid	Triwulan IV 2022

No	Resiko Prioritas	Kode Risiko	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *)	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
1	2	3	4	5	6	7	8
4	Pengelolaan BMD belum tertib	RSO.22. 37.25.07	Evaluasi berkala terhadap Kartu Inventarisasi Barang (KIB)	Belum ada label kode barang untuk BMD	Setiap BMD/Aset diberi label sesuai kode barang dan tempat	Kepala Dinas, Sekretaris, Kabid, Kasubbag /Kasubbid, JFT	Triwulan IV 2022
III	Risiko Operasional Badan Keuangan						
1	Kinerja Perangkat Daerah tidak memenuhi target	ROO.22. 37.25.05	Monitoring dan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan, jika tidak dapat dilaksanakan sesuai target segera mengidentifikasi kendala dan merumuskan penyelesaian kendala tersebut	Hasil Monitoring dan pengendalian tidak dilaksanakan	Laporan hasil tindak lanjut disampaikan kepada atasan	Kepala Dinas, Sekretaris, Kabid, Kasubbag /Kasubbid, JFT	Triwulan IV 2022
2	Data Evaluasi tidak valid	ROO.22. 37.25.06	Berkoordinasi dengan bidang terkait	Data berubah-ubah	Setiap data harus divalidasi oleh kepala bidang terkait	Kepala Dinas, Sekretaris, Kabid, Kasubbag /Kasubbid, JFT	Triwulan IV 2022
3	Laporan Keuangan SKPD tidak tepat waktu	ROO.22. 37.25.08	Koordinasi intensif antara bendahara pengeluaran/penerimaan dengan PPK	Koordinasi kurang efektif	Pergantian personil	Kepala Dinas, Sekretaris, Kabid, Kasubbag /Kasubbid, JFT	Triwulan IV 2022
4	Basis data pajak daerah yang tidak ter-update	ROO.22. 37.25.32	SOP Bidang P2D	Prosedur pengendalian belum dilaksanakan	Evaluasi pembaruan basis data pajak daerah secara periodik	Kepala Badan	Triwulan I, II, III, IV
5	Pajak daerah yang tidak tertagih	ROO.22. 37.25.36	SOP Bidang P2D	Prosedur pengendalian belum dilaksanakan	Evaluasi atas pajak daerah yang tidak tertagih	Kepala Badan	Triwulan III
6	Penyusunan peraturan daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD, melewati skedul yang sudah ditentukan	ROO.22. 37.25.42	SOP dan PP 12 Tahun 2019	Koordinasi dan Prosedur pengendalian sudah dilaksanakan tetapi belum mampu menangani resiko yang teridentifikasi	Koordinasi dengan SKPD lebih intens	Kepala Bidang	Triwulan I, II, III, IV
7	Jumlah Penyerapan yang tidak sesuai perencanaan	ROO.22. 37.25.44	Surat Percepatan	Tindak lanjut rendah	Laporan hasil tindak lanjut disampaikan kepada atasan	Kepala Dinas, Sekretaris, Kabid, Kasubbag /Kasubbid, JFT	Triwulan I, II, III, IV
			Monitoring dan Evaluasi	Koordinasi kurang efektif	Bimbingan Teknis	Kepala Dinas, Sekretaris, Kabid,	Triwulan I, II, III, IV

No	Resiko Prioritas	Kode Risiko	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *)	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
1	2	3	4	5	6	7	8
8	koordinasi akuntansi Penerimaan dan pengeluaran Kas Daerah tidak terlaksanan	ROO.22. 37.25.49	SOP Bidang AKLAP, PP 12 Tahun 2019, PMDN 77 Tahun 2021	Koordinasi dan Prosedur pengendalian sudah dilaksanakan tetapi belum	Koordinasi dengan SKPD lebih intens	Kepala Bidang	Triwulan I, II, III, IV
9	Dokuman Rancangan Peraturan Daerah dan Ranperbup Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kab tidak tersusun	ROO.22. 37.25.53	SOP Bidang AKLAP, PP 12 Tahun 2019, PMDN 77 Tahun 2021	Koordinasi dan Prosedur pengendalian sudah dilaksanakan tetapi belum mampu menangani resiko yang teridentifikasi	Koordinasi dengan SKPD lebih intens	Kepala Bidang	Triwulan I, II, III, IV
10	Laporan BMD tidak tepat waktu	ROO.22.37.25.65	Permendagri 19 Tahun 2016	Prosedur pengendalian sudah dilaksanakan tetapi belum mampu menangani resiko yang teridentifikasi	Implementasi Permendagri 47 Tahun 2021	Kepala Bidang	Triwulan I, II, III, IV

Ngawi, 25 Februari 2022
Menyetujui
KEPALA BADAN KEUANGAN
KABUPATEN NGAWI

Drs. TRI PUJO HANDONO
A Pembina Utama Muda
NIP. 19660409 198602 1 002